

Kontribusi Pemerintah Kota Bitung dalam Memajukan Pendidikan Non-Formal melalui Bantuan Sosial kepada PKBM

Rizky Fridolin¹, Bambang Shergi Laksmono²
^{1,2} Universitas Indonesia

Corresponding Author : Rizky Fridolin, E-mail : fridolin.rizky@ui.ac.id



ARTICLE INFO

Received: 2023-07-19
Accepted: 2023-10-10
Volume: 3
Issue: 2
DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v3i2.683>

KEYWORDS

Social Assistance, Contributions, Non-formal Education, PKBM

ABSTRACT

This research illustrates how the Bitung City Government's policy through social assistance for the distribution of the implementation of non-formal education programs in the center of community learning activities in an effort to increase the level of graduation of the community in Bitung City through the Equality Examinations program. As well as how the Bitung City Government's policy related to budget assistance to the center of community learning activities can accommodate the needs of people who drop out evenly and have the same opportunity in the fulfillment of educational services in Bitung City. Thus, this research focuses on two things, namely 1) Analyzing a non-formal education budget assistance policy issued by the Bitung City Government; 2) Knowing the optimization of social assistance to the center of community learning activities for justice and equity in education for people of Bitung City. The research uses a qualitative approach with a type of descriptive research by collecting data that researchers will use, namely through: in-depth interviews, observations and documentation studies. Through this research, it is known that the Bitung City Government has tried to strengthen the non-formal education sector through social assistance in the operational budget for equitable implementation of equality education programs at the center of community learning activities; the conclusion is that the Bitung City Government must maintain the aid policy for the long term by making a Mayor Regulation Consider the number of high school dropout communities and the limitations of the community learning activity center itself.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan di kehidupan umat manusia merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi di sepanjang hidupnya, karena tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat maju dan berkembang, memenuhi kebutuhannya, serta dapat sejahtera dan bahagia. Sejalan dengan dinamika dari tuntutan reformasi, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang bagi daerah (Kabupaten/Kota).[1] Guna menciptakan kemandirian dalam pembangunan yang tentunya berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan keadilan yang memperhatikan betul potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan Pemerintah Daerah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang lebih detail berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan

SMP) menjadi sebuah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.[2]

Berbagai permasalahan tentang pendidikan yang begitu beragam memerlukan siasat perubahan yang terstruktur serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemajuan, perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pendidikan masih dapat dikategorikan sebagai permasalahan klasik yaitu menyoal tentang kualitas, pemerataan dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, fenomena angka putus sekolah yang masih tergolong cukup tinggi berdasarkan data dinas pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kota Bitung tercatat sebanyak 9000 masyarakat putus sekolah dan diperpara keadaanya dengan masih banyaknya masyarakat di Kota Bitung yang hanya memiliki tingkat kelulusan pada taraf sekolah menengah pertama dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan tingkat lanjut. Dengan adanya fenomena tersebut, Pemerintah Kota Bitung menaruh perhatian khusus dalam upaya memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan bantuan sosial agar dapat menuntaskan layanan program wajib belajar yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan nonformal.[3]

Oleh karena itu peran pemerintah Kota Bitung untuk berkomitmen menunjang peran pemerintah pusat dalam memperdayakan lembaga pendidikan nonformal secara optimal melalui bentuk-bentuk bantuan yang secara khusus dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota Bitung, dan secara optimal merespon kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan nonformal yang sekarang semakin meningkat, ketidakmampuan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pendidikan menyebabkan pemerintah harus dapat mendorong sekolah nonformal untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat dimana kebutuhan pendidikan yang diperoleh masyarakat saat ini tidak akan dapat memenuhi tuntutan dunia kerja, ilmu pengetahuan dan keterampilan merupakan modal penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sosial mereka. Kondisi seperti ini menuntut peran pemerintah untuk melahirkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai tambahan kelengkapan bagi pendidikan formal atau sekolah yang sering kali kurang dapat merespon berbagai kebutuhan akan perkembangan yang ada di masyarakat sehingga tuntutan akan pelengkapan penyedia layanan pendidikan nonformal dalam masyarakat sangat dibutuhkan sebagai instrument pemerataan pendidikan.

Program Paket A paket B dan paket C serta kursus ketrampilan, pelatihan komputer, bahasa asing dan taman baca masyarakat yang merupakan bagian dari program pemerataan pendidikan berguna untuk memberikan akses pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: (Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat) dan pada pada pasal 26 ayat 3 menyebutkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksarahan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik. Melalui undang-undang tersebut dapat dimengerti bahwa program pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh bidang pendidikan nonformal dapat dimasukkan dalam fungsinya sebagai pengganti pendidikan formal, ini membantu bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan formal untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan selanjutnya melalui ujian kesetaraan. [4]

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kota Bitung terdapat 19 PKBM, namun yang aktif menyelenggarakan kegiatan hanya 13 PKBM saja, sedangkan untuk masyarakat putus sekolah dengan rentan usia peserta wajib belajar dan masyarakat umum terhitung sebanyak 8.780 masyarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, 2022) dengan rincian 2.540 masyarakat dengan usia 7 s/d 21 tahun dan 6.240 masyarakat berusia di atas 21 tahun, dengan jumlah angka tersebut masing-masing PKBM memiliki kewajiban untuk dapat mengakomodir masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan nonformal, namun permasalahan yang terjadi selama ini PKBM hanya dapat menyelenggarakan program pendidikan nonformal bagi mereka yang menerima bantuan operasional kesetaraan dari pemerintah pusat yaitu peserta dengan rentang usia 7 sampai dengan 21 tahun saja yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai penerima manfaat, sedangkan di Kota Bitung sendiri sebagian besar masyarakat yang membutuhkan pendidikan nonformal rata-rata berusia diatas 21 tahun. Hal ini membuat anggaran operasional PKBM tidak akan dapat mengakomodir penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara menyeluruh karena bantuan anggaran yang diterima tidak cukup dan regulasi yang tidak mengakomodir permasalahan umur calon peserta didik yang ada, untuk itu Pemerintah Kota Bitung harus berperan lebih aktif dengan mengeluarkan kebijakan bantuan sosial anggaran kepada PKBM guna untuk membantu pemerataan pendidikan dan kesempatan bagi masyarakat Kota Bitung khususnya di sektor pendidikan nonformal.[5]

Beberapa kajian terdahulu mengenai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) antara lain: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui berbagai program pendidikan seperti bimbingan belajar, pengejaran paket kesetaraan, dan pelatihan keterampilan hidup.[6] Pembentukan PKBM melibatkan sosialisasi masyarakat, pembentukan manajemen oleh penduduk setempat, dan promosi melalui media pendidikan.[7] PKBM berfungsi sebagai platform untuk pembelajaran sepanjang hayat, menekankan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Selain itu, fleksibilitas dan strategi inovatif PKBM sangat penting untuk keberlanjutan dan pengembangannya dalam pendidikan nonformal.[8] Fleksibilitas arsitektur, seperti yang terlihat di PKBM Yogyakarta, memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang terpinggirkan[9]. Studi-studi ini menyoroti pentingnya PKBM dalam membina pengembangan masyarakat dan kesempatan belajar sepanjang hayat.

Penelitian ini menyoroti peran krusial PKBM dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan fleksibilitas arsitektur untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Pendekatan inovatif dan strategi fleksibel yang digunakan oleh PKBM menunjukkan dampak signifikan pada pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan ekonomi komunitas. Studi ini menegaskan pentingnya adaptasi lokal dan manajemen partisipatif dalam keberlanjutan pendidikan nonformal.



2. KAJIAN LITERATUR

Kontribusi

Kontribusi dalam konteks pendidikan mengacu pada segala bentuk dukungan yang diberikan oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan. Bentuk kontribusi ini bisa berupa dana, waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Kontribusi juga dapat berupa upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Kontribusi yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan dan menyediakan kesempatan belajar yang merata bagi semua lapisan masyarakat.[10]

Pemerintah Kota

Pemerintah kota adalah badan pemerintahan lokal yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek kehidupan di wilayah perkotaan. Tugas utama pemerintah kota meliputi penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, serta pelaksanaan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pemerintah kota berperan dalam mengalokasikan sumber daya, menyusun kebijakan pendidikan, serta memfasilitasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di daerahnya. Pemerintah kota juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai inisiatif pendidikan non-formal yang dijalankan oleh komunitas dan organisasi lokal.[11]

Pendidikan NonFormal

Pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau kelompok yang tidak terjangkau oleh sekolah formal. Pendidikan non-formal mencakup berbagai kegiatan, seperti kursus keterampilan, program literasi, pendidikan kesetaraan, dan pelatihan vokasional.

Pendidikan ini menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran, sehingga dapat disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan non-formal berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat dan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari.[12]

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang didirikan oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan non-formal. PKBM berfungsi sebagai tempat pembelajaran yang menawarkan berbagai program, termasuk kursus keterampilan, pendidikan kesetaraan, dan kegiatan literasi. PKBM bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas, PKBM mampu memahami dan memenuhi kebutuhan lokal, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembelajaran.[13]

Kontribusi PKBM dalam Pendidikan Non-Formal

PKBM memberikan kontribusi signifikan dalam pendidikan non-formal dengan menyediakan berbagai program yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Melalui PKBM, individu dapat memperoleh keterampilan baru, meningkatkan literasi, dan mengejar pendidikan kesetaraan yang dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup. PKBM juga berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan menyediakan ruang untuk belajar dan berkembang, serta mendukung pengembangan komunitas yang lebih inklusif dan berdaya. Dengan demikian, PKBM menjadi salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan pendidikan non-formal dan mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat.[13]

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi PKBM

Implementasi PKBM menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dana, sumber daya, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Selain itu, stigma terhadap pendidikan non-formal yang dianggap kurang prestisius dibandingkan dengan pendidikan formal dapat menghambat partisipasi masyarakat. Namun, terdapat juga banyak peluang untuk mengembangkan PKBM, terutama dengan dukungan dari pemerintah kota dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Inovasi dalam teknologi pembelajaran, misalnya, dapat membantu PKBM untuk mencapai lebih banyak peserta didik dan menyediakan program yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, PKBM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan pendidikan non-formal.[14]

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam[15] kebijakan anggaran pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan di Kota Bitung melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Objek penelitian adalah kebijakan anggaran pemerintah kota dan implementasinya di PKBM, yang mencakup empat PKBM yaitu PKBM Kanaba & Nayomi, PKBM Cinta Kasih, PKBM Becc Berkarya, PKBM Syalom, serta kepala bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2024, dengan fokus pada analisis kebijakan dan implementasi di lapangan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, yaitu empat kepala PKBM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pendidikan non-formal dan kepala bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan di kota tersebut. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, peraturan pemerintah, dan literatur terkait pendidikan non-formal serta kebijakan anggaran pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, catatan lapangan, dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, yang dimulai dari pengumpulan data lapangan, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean data, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode, serta pengecekan ulang dengan informan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan.[16] Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan anggaran pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan non-formal di Kota Bitung dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial melalui PKBM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan satuan lembaga pendidikan yang menjalankan program pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang terdegradasi dari sistem pendidikan formal. PKBM berfungsi untuk menjangkau secara luas atas kesempatan mendapatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah dalam berbagai kalangan usia.[17] PKBM berada dibawah naungan Pemerintah Kota Bitung melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, PKBM memiliki kewajiban untuk melaksanakan program pendidikan kesetaraan yang pada masa sekarang. PKBM hadir untuk mendukung penuntasan program wajib belajar kepada masyarakat dan pelibatangannya dalam memberikan layanan pendidikan luar sekolah sebagai bagian penting dalam pelayanan pendidikan untuk masyarakat. Berbagai program pendidikan kesetaraan dan kursus keterampilan dalam pendidikan nonformal yaitu program ujian Paket A, Paket B dan Paket C, dan pelatihan keterampilan komputer, tata boga, taman baca masyarakat serta kursus bahasa asing.[18] Ini merupakan layanan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat dan secara khusus mendukung peningkatan jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan tertentu yang berguna sebagai pemenuhan syarat bagi masyarakat angkatan kerja. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasa 26 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: (Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat).[19]

Peran Pemerintah Pusat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam melaksanakan program pendidikan kesetaraannya mendapatkan dukungan dari pihak Pemerintah Pusat, dukungan yang diterima berupa bantuan operasional pendidikan (BOP) kesetaraan yang mengakomodasi peserta dari rentang usia 7 sampai 21 tahun, khusus untuk usia peserta didik yang terdaftar sebagai peserta pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C dalam sistem dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk masyarakat putus sekolah atau yang belum pernah mendapatkan pelayanan pendidikan dari usia dini yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2022, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang mengatur bahwa bantuan tersebut hanya diperuntukan bagi peserta yang terdaftar di dapodik yang berusia 7 sampai dengan 21 tahun saja. Namun hal ini lah yang menjadi kendala bagi PKBM di Kota Bitung karena di lapangan justru ditemukan peserta didik maupun calon peserta yang lebih dominan ditempati oleh mereka yang berusia lebih dari 21 tahun yang tentunya karena kebijakan tersebut masyarakat tidak dapat didaftarkan di data pokok pendidikan pemerintahan pusat sebagai penerima bantuan.[20] Seperti yang disampaikan oleh PKBM Syalom bahwa bantuan operasional pendidikan kesetaraan yang diterima dari regulasi Pemerintah Pusat hanya mengakomodir peserta usia tertentu saja dan bantuan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di PKBM

“Namun kalo bantuan dari pemerintah pusat itu langsung masuk ke rekening PKBM sendiri, ini yang usia 7 s/d 21 kebawa itu dari pusat, namun sisanya yang banyak sekali ini usia 21 keatas tidak dapat bantuan dari pusat, makanya pemerintah kota bitung akan memberikan bantuan muda2han di akhir tahun 2022” (SK,17/11/22)

Hal ini juga dipertegas oleh kepala Bidang PAUD dan nonformal dinas pendidikan dan kebudayaan Pemerintah kota Bitung bahwa jika PKBM hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat saja pasti tidak akan cukup untuk membiayai operasional kerja PKBM, ini terjadi karena tingkat masyarakat putus sekolah di Kota Bitung masih tergolong tinggi, dan hal itu tentunya berdampak pada peningkatan peserta di PKBM.

“Kalau menurut kami di Dinas Pendidikan memang bantuan yang diberikan dalam bentuk uang Bop juga dengan sarana prasarana yang diberikan itu belum mencukupi karena kita melihat perkembangan yang ada di setiap PKBM itu untuk putus sekolah itu terkait dengan jumlahnya Memang agak banyak kalau melihat bantuan yang diberikan bukan saya bilang kecil tidak, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan dari PKBM itu sendiri Karena kalau dalam pelaksanaan kegiatan program PKBM kalau memang tidak dibarengi juga dengan sarana prasarana yang tersedia Memang agak susah terlebih karena prasarana keterampilan itu yang paling dibutuhkan sekali oleh PKBM.” (WL,17/12/22)

Dari pernyataan PKBM Syalom dan Kepala Bidang PAUD dan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bitung, terlihat jelas bahwa bantuan operasional pendidikan kesetaraan yang diterima dari regulasi Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di PKBM. Bantuan dari pemerintah pusat hanya mengakomodir peserta didik berusia 7 hingga 21 tahun, sementara peserta didik berusia di atas 21 tahun yang jumlahnya cukup banyak tidak mendapatkan bantuan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional PKBM. Untuk

mengatasi kekurangan ini, Pemerintah Kota Bitung berencana memberikan bantuan tambahan di akhir tahun 2022, dengan harapan dapat mengisi kekosongan yang tidak terjangkau oleh bantuan pusat.

Kepala Bidang PAUD dan Nonformal juga menegaskan bahwa ketergantungan PKBM hanya pada bantuan pusat tidaklah cukup, terutama karena tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung yang berimbas pada peningkatan jumlah peserta didik di PKBM. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang dan sarana prasarana belum dapat memenuhi kebutuhan PKBM secara menyeluruh.[21] Kebutuhan utama seperti sarana keterampilan yang vital untuk kegiatan program PKBM masih belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tambahan berupa sarana prasarana dan dana operasional yang memadai untuk menjamin kelancaran dan efektivitas program pendidikan kesetaraan di PKBM.[22]

Peran Pemerintah Daerah Kota Bitung

Dalam upaya peningkatan dan jangkauan pemerataan pendidikan di Kota Bitung Pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk membantu pusat kegiatan belajar masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal, untuk itu pemerintah telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta guna menunjang sarana dan prasarana berupa pemasangan internet gratis yang diberikan oleh pemerintah dan tv serta laptop yang berjumlah 1 unit dari pihak swasta yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dan tidak hanya disitu pemerintah juga telah merencanakan bantuan non-fisik berupa anggaran operasional pelaksanaan program pendidikan nonformal untuk menanggulangi permasalahan regulasi bantuan bagi peserta didik dari Pemerintah Pusat.

Seperti yang diinformasikan oleh informan kepala PKBM bahwa bantuan diberikan berupa sarana dan prasarana dari perusahaan disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa TV dan Laptop.

“Kalau yang jaman sekarang, itu pemerintah tahun ini lewat pemerintah sekarang pak Walikota yang sekarang, beliau melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk dana CSR, nah CSR ini untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran di PKBM salah satunya Sarpas (sarana dan prasarana) seperti tv dan komputer, Jadi yang diterima itu ada Laptop 1 dan tv 1, yaa setidaknya sudah sedikit meringankanlah dikarenakan sudah ketambahan unit. Karena laptop di PKBM inikan sudah termakan usia, ada yang harus di service jadi ketika ada tambahan yaa sudah cukup membantu.” –(OB,09/11/22).”

Pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk meningkatkan dan meratakan jangkauan pendidikan dengan membantu pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah kerjasama dengan pihak swasta guna menunjang sarana dan prasarana di PKBM.[23] Melalui kerjasama ini, pemerintah telah berhasil memasang internet gratis dan menerima bantuan berupa TV dan laptop dari perusahaan swasta,[24] yang kemudian disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Langkah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pendidikan nonformal di Kota Bitung, serta mengatasi keterbatasan yang ada.

Selain itu, Pemerintah Kota Bitung juga telah merencanakan bantuan non-fisik berupa anggaran operasional untuk pelaksanaan program pendidikan nonformal.[25] Ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan regulasi bantuan bagi peserta didik yang tidak tercakup oleh bantuan dari Pemerintah Pusat. Informasi dari kepala PKBM menyebutkan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang diterima berupa TV dan laptop sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di PKBM. Tambahan unit ini menjadi solusi bagi perangkat yang sudah usang dan memerlukan perbaikan, sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan nonformal di wilayahnya.[26]

Bantuan Fisik

Bantuan operasional terhadap PKBM sudah diupayakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan kegiatan belajar pendidikan nonformal, seperti yang diinformasikan oleh informan kepala PKBM bahwa sudah mendapatkan bantuan berupa pemasangan akses internet gratis dari pemerintah guna mendukung pembelajaran secara online.[27]

“Jumlah warga belajar yang ada di PKBM Syalom yang dibagi dua untuk usia 21 tahun ke bawah paket A 5 orang Paket B 21 orang paket C 69 orang Ada juga siswa dari daerah luar, namun dengan catatan mereka harus datang belajar, namun karena sudah ada bantuan pemerintah wifi mereka juga boleh belajar lewat online, tapi untuk sementara karena sudah tidak ada covid tapi akan dikembalikan lagi bagi mereka uang jauh.” –(SK,17/11/22)

Namun pendistribusian bantuan akses internet gratis dari Pemerintah Kota Bitung tersebut nyatanya dilapangan masih belum terdistribusi secara merata, ditemukan di lapangan terdapat PKBM yang masih belum mendapatkan akses tersebut, dikarekan terkendala akses jaringan dan letak PKBM yang terletak di seberang pulau, hal ini diinformasikan langsung oleh kepala PKBM Cinta Kasih yang berada di pulau Lembeh bahwa mereka belum mendapatkan bantuan wifi dari pemerintah, meski bantuan fisik berupa laptop dan tv yang disalurkan oleh dinas pendidikan telah mereka terima.

“Memang baru-baru ini kami menerima bantuan laptop 1 dan tv 1 tapi itu bantuan dari perusahaan atau CSR tapi melalui dinas. Jadi melalui dinas pendidikan memberikan bantuan atau didistribusikan ke semua PKBM. Kami juga belum dapat bantuan wifi gratis, saya sebagai ketua PKBM sudah berusaha menghubungi camat, lurah karena ada satu titik yang belum digunakan tapi sampai saat ini belum terealisasi. Padahal sudah melapor kepada bapak camat dan lurah yang waktu itu sudah dikumpulkan disini, PKBM sangat membutuhkan sekali wifi tersebut karena pembelajaran ini kana da warga belajar yang di kapal ada yang sementara kerja, kita akan memberikan pembelajarannya secara online namun karena tidak ada wifi jadi tidak jalan.” –(RD,21/11/22)

Bantuan pemerintah dalam bentuk fisik sudah terlaksanakan dengan memanfaatkan bantuan CSR dari perusahaan kepada PKBM sebagai bentuk komitmen pemerintah guna membantu kegiatan operasional pendidikan kesetaraan, namun terdapat permasalahan terkait dengan pendistribusian bantuan akses internet gratis untuk PKBM yang masih belum merata terhadap PKBM khususnya yang berada di wilayah kepulauan yang terkendala akses jaringan.[28]

Bantuan Non-fisik

Permasalahan PKBM dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah anggaran operasional yang belum mencukupi.[29] Apabila hanya berpatokan oleh bantuan pemerintah pusat, untuk itu Pemerintah Kota Bitung dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya menganggarkan dalam APBD untuk membantu kegiatan pendidikan nonformal di Kota Bitung dengan besaran bantuan akan menyesuaikan dengan kebutuhan PKBM atau banyaknya peserta yang terdaftar di PKBM tersebut.

Hal ini diinformasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan usia Dini dan Pendidikan Nonformal bahwa pada tahun 2023 akan ada bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan anggaran operasional bagi PKBM di Kota Bitung.

“Ada juga untuk 2023 kami sudah menganggarkan 2,5 M dari 2,5 itu selain dari BOP kesetaraan ada juga di peruntukan untuk sarana dan prasarana. –(WL,17/12/22)

Selaras dengan informasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bitung, hal ini juga dipertegas oleh PKBM bahwa memang di tahun 2022 – 2023 pemerintah kota Bitung sudah mensosialisasikan terkait dengan bantuan anggaran operasional bagi semua PKBM di Kota Bitung. Hal ini juga disampaikan oleh kepala PKBM Becs Berkarya bahwa bantuan non fisik dalam bentuk anggaran operasional dari Pemerintah Kota Bitung juga sedang dalam upaya penyusunan untuk diajukan pada APBD Pemerintah Kota Bitung, yang nanti nya besaran nominal yang akan diterima mengikuti dari jumlah peserta didik yang mendaftar untuk pendidikan kesetaraan pada tahun 2023

“Kalau non- fisik dalam tahun ini pemerintah sementara diupayakan untuk masuk dalam anggaran itu ada dana dari APBD untuk PKBM di Bitung, namun dana ini sedang dalam proses katanya, mungkin tahun 2022 atau bahkan 2023. Jadi memang sudah ada upaya pemerintah untuk membantu secara fisik dan nonfisik, Terkait bantuan non fisik itu kalau saya tidak salah itu mengikuti jumlah dari 7 sampai 21 tahun yang sama dengan pusat tapi itu anggaran dari APBD, karena kemarin sempat mendengar Info bahwa 7 sampai 21 tahun itu pusat, Jadi ketika program kesetaraan dikatakan gratis oleh pemerintah daerah dan memang pemerintah sangat konsen sekali terkait masalah ini, jadi ketika dikatakan gratis lalu hanya mendapatkan 30% dari biaya biaya ini kan pasti agak memberatkan. Ini kalau angka nya kalo tidak salah 60jtan tapi dibagi 2, tahap satu 30an tahap dua 30an, Jadi itu berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar” (OB,09/11/22)

Jadi berdasarkan informasi yang diterima dari informan bahwa Pemerintah Kota Bitung sudah berupaya untuk membantu dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan terhadap PKBM dengan membuat kebijakan bantuan sosial anggaran untuk mengakomodir permasalahan masyarakat putus sekolah di Kota Bitung untuk mendaftar secara gratis agar keadilan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kota Bitung dapat tercapai melalui pusat kegiatan belajar masyarakat.[30]

Tabel 1. Matriks Bantuan Pemkot Bitung

Dimensi	Permasalahan	Rekomendasi
---------	--------------	-------------

Kontribusi Pemerintah Kota Bitung dalam Memajukan Pendidikan Non-Formal melalui Bantuan Sosial kepada PKBM

Peran Pemerintah Kota Bitung	Tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung. Rata-rata masyarakat hanya lulus tingkat sekolah menengah pertama. Tidak ada bantuan operasional pendidikan kepada PKBM yang bersifat jangka panjang dari pemerintah daerah.	Membuat kebijakan dalam penguatan sektor pendidikan nonformal dengan bentuk Peraturan Walikota (PERWAKO) yang mengatur terkait dengan pemerataan bantuan anggaran operasional pendidikan kesetaraan bagi PKBM dengan besaran bantuan dapat menyesuaikan dari jumlah peserta atau masyarakat yang mendaftar di PKBM yang bersifat multi-years agar tercapainya pemerataan pendidikan nonformal di Kota Bitung
Bantuan Sosial Pendidikan Kesetaraan	Bantuan operasional pendidikan kesetaraan hanya diterima dari Pemerintah Pusat yang hanya dapat mengakomodir peserta didik di PKBM pada rentang usia 7 s/d 21 tahun saja Hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam menunjang penyediaan pembelajaran pendidikan nonformal belum maksimal Bantuan fisik berupa akses internet gratis kepada PKBM belum diterima secara merata	Dalam pendistribusian bantuan fisik kepada PKBM dinas pendidikan sebagai instansi yang memiliki kewenangan pelaksanaan kebijakan, harus dapat membuka kerjasama lebih banyak lagi dengan pihak – pihak dari luar pemerintahan untuk dapat membantu pusat kegiatan belajar masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan kesetaraan. Serta untuk bantuan akses internet gratis kepada PKBM dinas pendidikan harus membuat surat permohonan kepada Pemerintah Kota Bitung, untuk memprioritaskan pemasangan akses internet gratis tersebut kepada PKBM selaku tempat pelaksanaan pembelajaran pendidikan.
Pelayanan Sosial pendidikan nonformal	Tidak adanya bentuk kerjasama dengan pihak swasta yang dilakukan oleh PKBM untuk menunjang kebutuhan PKBM PKBM rata-rata tidak memiliki ruangan khusus belajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran	Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Kota Bitung yang dilaksanakan oleh PKBM tidak harus selalu bergantung kepada bantuan pemerintah saja oleh karena itu semua PKBM wajib Merencanakan <i>funding</i> dan kemitraan dengan pihak lain di luar pemerintahan yang mendukung atau memiliki kesamaan nilai tentang penyediaan pembelajaran pendidikan nonformal yang ada dan untuk PKBM.

5. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan non-formal di Kota Bitung melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan anggaran operasional yang hanya mencakup peserta berusia 7 hingga 21 tahun. Meskipun demikian, upaya pemerintah kota dalam memberikan bantuan sosial dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program pendidikan non-formal patut diapresiasi. Bantuan ini mencakup anggaran dari APBD, distribusi perangkat teknologi melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemasangan akses internet gratis, meskipun belum merata.

Kekuatan dari program ini terletak pada komitmen pemerintah kota dan kolaborasi dengan sektor swasta yang menunjukkan dedikasi terhadap peningkatan pendidikan non-formal. Namun, keterbatasan utama adalah distribusi bantuan yang belum merata dan kebijakan anggaran yang belum mencakup peserta berusia di atas 21 tahun secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota disarankan untuk menyusun Peraturan Walikota (PERWAKO) yang memastikan kesinambungan bantuan operasional secara jangka panjang. Selain itu, perlu adanya pendataan ulang dan strategi distribusi yang lebih efektif untuk memastikan akses internet dapat diterima oleh semua PKBM, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan non-formal di Kota Bitung.

REFERENSI

- [1] H. A. Saleh, "Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah," *J. Adm. Dan Kebijak. Kesehat. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–24, 2016.
- [2] J. M. JM Tedjawati K, L. S. Sari, F. Juanita M, R. Astuti, and U. T. Rahmadi, "Model pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum sekolah dasar: Kajian pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal dan pendidikan

- masyarakat,” 2018, *Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud*.
- [3] antaranews.com, “Pemkot Bitung kolaborasi camat-lurah data anak putus sekolah.” [Online]. Available: <https://manado.antaranews.com/berita/215021/pemkot-bitung-kolaborasi-camat-lurah-data-anak-putus-sekolah>
- [4] S. Hidayatulloh, “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Life Skill Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus),” 2018, *UIN Raden Intan Lampung*.
- [5] detik.com, “Walkot Bitung Bicara Pentingnya Digitalisasi dalam Dunia Pendidikan.” [Online]. Available: <https://www.detik.com/sulsel/sulsel-ewako/d-6368806/walkot-bitung-bicara-pentingnya-digitalisasi-dalam-dunia-pendidikan>
- [6] G. S. Adi and M. Mitasari, “Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” *JIWAKERTA J. Ilm. Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 2021, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:248330418>
- [7] S. R. Sihombing, S. Hasibuan, and Y. M. R. Sitepu, “Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar di Paud Kartini Sidodadi Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu,” *CENDEKIA J. Ilmu Sos. Bhs. dan Pendidik.*, 2023, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256167411>
- [8] I. Ridwan, “EKSISTENSI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN,” 2017. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:115581092>
- [9] H. A. Jamilah, O. Purwani, and L. Pramesti, “KONSEP FLEKSIBILITAS SIX S PADA DESAIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI YOGYAKARTA,” 2020. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:219805490>
- [10] I. N. Marayasa, E. Sugiarti, and R. Septiowati, “Pengembangan sumber daya manusia,” 2017, *Zahir Publishing*.
- [11] A. Widodo and D. A. Permatasari, “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City,” *ETTISAL J. Commun.*, vol. 5, no. 1, pp. 79–89, 2020.
- [12] M. Pienimäki, M. Kinnula, and N. Iivari, “Finding fun in non-formal technology education,” *Int. J. Child-Computer Interact.*, vol. 29, p. 100283, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100283>.
- [13] M. J. Anderson-Coto *et al.*, “Towards culturally sustaining design: Centering community’s voices for learning through Participatory Design,” *Int. J. Child-Computer Interact.*, vol. 39, p. 100621, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2023.100621>.
- [14] H. M. ALTaleb *et al.*, “Facilitators and barriers to learning faced by female students with disability in higher education,” *Heliyon*, vol. 10, no. 10, p. e30774, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30774>.
- [15] F. W. Roosinda *et al.*, *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing, 2021.
- [16] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage, 2014.
- [17] A. Muchlisin, A. Zuber, and B. Haryono, “Peran pendidikan alternatif dalam menanggulangi siswa putus sekolah,” *Society*, vol. 8, no. 2, pp. 719–731, 2020.
- [18] S. N. Suryadi, A. P. Sari, A. A. A. S. Supiyati, and E. Arifah, *PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Peran Pendidikan di Dalam Masyarakat*. GUEPEDIA, 2022.
- [19] R. I. Undang-Undang, “Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Bandung: Citra Umbara*, 2003.
- [20] U. Suminar and M. Hisyam, “Pengembangan Model Pendidikan Multikekaksaraan Berbasis Potensi Lokal

Melalui Pembelajaran Proyek,” in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 2021.

- [21] E. Z. Mann, A. N. Reese, M. Madden, and T. Henkel, “Facilitating inclusive and equitable curricular changes: A case study of embedded librarianship in a faculty learning community,” *J. Acad. Librariansh.*, vol. 50, no. 4, p. 102888, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102888>.
- [22] A. Crowl, A. Robertson, S. Go, J. Barnes, and S. Shrader, “Evaluation of a simulation-based learning activity for communicating about at-risk opioid behaviors in a community pharmacy setting,” *Curr. Pharm. Teach. Learn.*, vol. 14, no. 12, pp. 1512–1517, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2022.10.008>.
- [23] S. Y. Yim and T. youn Ahn, “Learning silence and passivity: Novice teacher’s participation in teaching community,” *Teach. Teach. Educ.*, vol. 143, p. 104551, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104551>.
- [24] L.-C. Lin, M.-C. Chang, H.-C. Yang, and M.-C. Wei, “Enhancing disaster prevention learning through human-centered design: Students’ learning cognition and enjoyment in informal educational settings,” *Int. J. Disaster Risk Reduct.*, vol. 106, p. 104451, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104451>.
- [25] H. Chen, Y. Wen, and J. Jin, “Computer-aided teaching and learning of basic elementary functions,” *Heliyon*, vol. 9, no. 5, p. e15987, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15987>.
- [26] M. S. Ismayani, Y. Darusman, S. Syaefuddin, and D. Kurniawan, “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP),” *Jendela PLS J. Cendekiawan Ilm. Pendidik. Luar Sekol.*, vol. 4, no. 1, pp. 38–45, 2019.
- [27] L. MM, “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembagunan Pendidikan,” *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [28] R. D. Pangestu, “Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. JICT (Jakarta International Container Terminal) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Sektor Pendidikan.,” 2019, *Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif*
- [29] A. Sastrawijaya, E. Pujiastuti, and S. Maemuna, “Penyusunan Kurikulum Operasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kearifan Lokal pada PKBM,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, pp. 1966–1982, 2023.
- [30] C. N. Haruna, “Efektivitas program pendidikan kesetaraan Paket B dan C oleh pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Cendikia di Kabupaten Pangandaran,” *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 3, pp. 53–63, 2018.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).